

## UNIT KEGIATAN BELAJAR (UKB PPKN- 02.1.3.3)

### 1. Identitas

- a. Nama Mata Pelajaran : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.  
 b. Semester : Ganjil  
 c. Beban : 2 SKS  
 d. Kompetensi Dasar :

Permendikbud  
No 24/2016

KD 3.3	Menganalisis fungsi dan kewenangan lembaga lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
KD 4.3	Mendemonstrasikan hasil analisis tentang fungsi dan kewenangan lembaga lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- e. Indikator Pencapaian Kompetensi :

IPK 3.3.1	Mengidentifikasi suprastruktur sistem politik Indonesia
IPK 3.3.2	Mendeskripsikan lembaga lembaga negara RI menurut UUD Tahun 1945.
IPK 3.3.3	Menunjukkan partisipasi warga negara dalam sistem politik RI
IPK 3.3.4	Menganalisis impeachment dalam ketatanegaraan RI menurut UUD 1945
IPK 3.3.5	Menganalisis tatakelola pemerintahan yang baik
IPK 4.3.1	Menyaji hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
IPK 4.3.2	Mengkomunikasikan hasil telaah analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .

Factual  
C2

C4  
Procedural

Abstrak C5

Konkret C5

C1  
konseptual

Factual C3

- f. Materi Pokok : Kewenangan lembaga negara menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945.  
 g. Alokasi Waktu : 10 x 45 menit ( 5 x pertemuan )

h. Tujuan Pembelajaran :

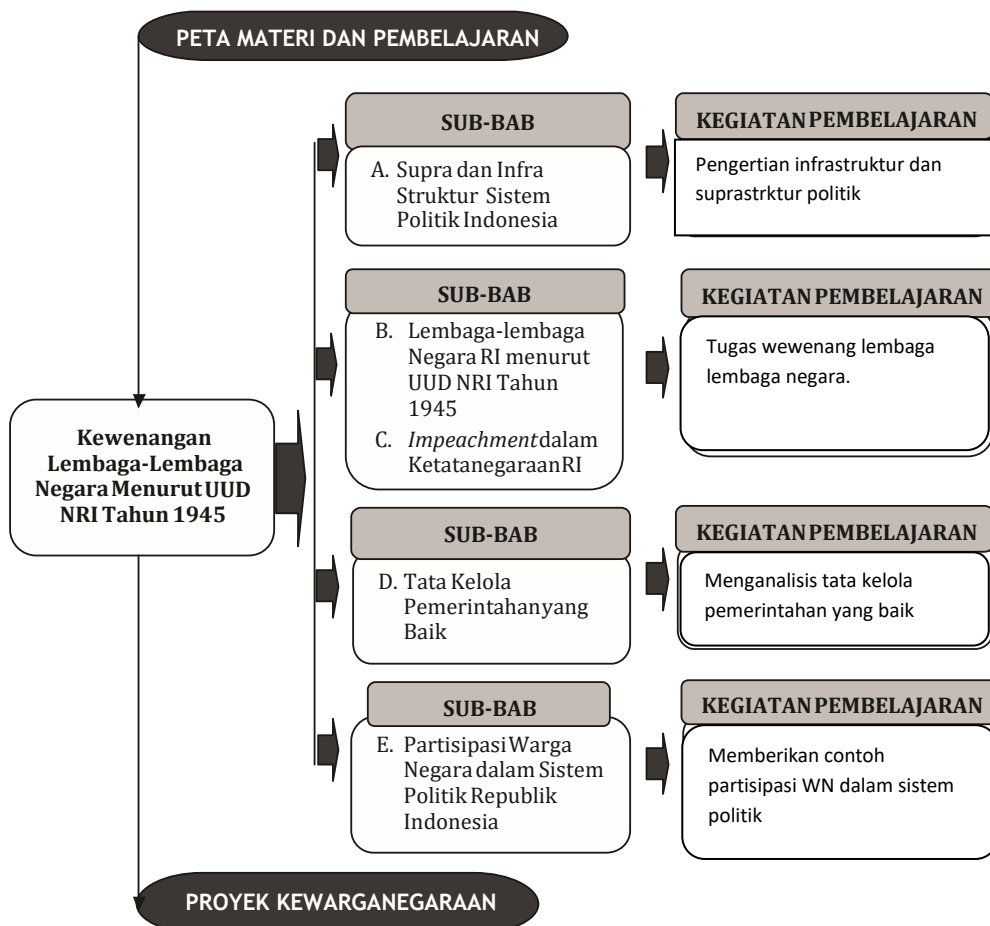
C4. Literasi, kontekstual, karakter

Melalui diskusi, tanya jawab, penugasan, analisis dan bermain peran, kalian dapat menyusun naskah peradilan semu dari suatu perkara kontekstual dan dapat mengetahui tugas dan wewenang alat kelengkapan dalam peradilan, sehingga kalian dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang kalian yakini, sehingga kalian dapat mengembangkan sikap jujur, peduli, dan bertanggungjawab, serta dapat mengembangkan kemampuan **berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas (4C)**.

i. Materi Pembelajaran

- Suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia.

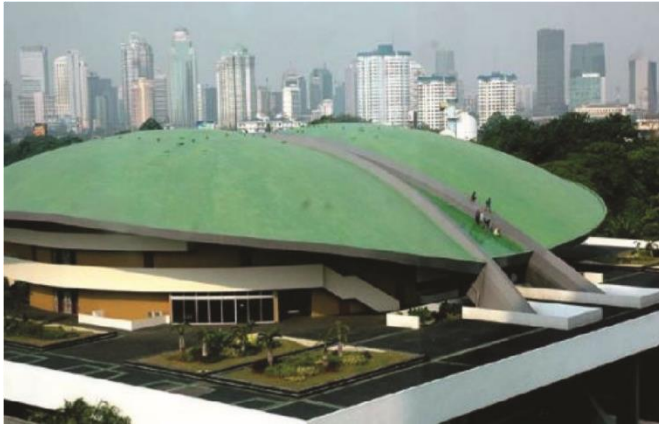
## 2. Peta Konsep



### 3. Kegiatan Pembelajaran

#### a. Pendahuluan

Sebelum belajar pada materi ini silahkan kalian melihat gambar di bawah ini.



Stimulus trending  
topik tentang  
Suprastruktur  
sistem politik  
Indonesia

Tahukah kalian gambar apakah itu



Gambar partai politik  
dalam pemilu RI

Untuk dapat menjelaskan gambar amatidengan sungguh, silahkan kalian lanjutkan ke kegiatan belajar berikut dan ikuti petunjuk yang ada dalam UKB ini

Ayo  
berliterasi

#### b. Kegiatan Inti

##### 1) Petunjuk Umum UKB

- Baca dan pahami** materi pada buku paket PPKn ( BTP ). Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, hal 88 sd 98.
- Setelah memahami isi materi dalam bacaan **berlatihlah untuk berfikir tingkat tinggi** melalui tugas-tugas yang terdapat pada UKB ini baik bekerja sendiri maupun bersama teman sebangku atau teman lainnya.

Critical thinking  
dan colaborative

- c) **Kerjakan UKB** ini dibuku kerja atau langsung mengisikan pada bagian yang telah disediakan.
- d) Kalian dapat **belajar bertahap dan berlanjut** melalui kegiatan **mari berlatih**, apabila kalian yakin sudah paham dan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam kegiatan belajar 1, 2, 3 dan 4 kalian boleh sendiri atau mengajak teman lain yang sudah siap untuk **mengikuti tes formatif** agar kalian dapat belajar ke UKB berikutnya.

## 2) Kegiatan Belajar

Literasi,  
factual, karakter

*Mari kita belajar.....ikuti kegiatan belajar berikut dengan penuh kesabaran dan konsentrasi. RASA INGIN TAHU DAN MENGAJARI*

C2,  
konseptual

### Kegiatan Belajar 1

- 1.1 . Mendeskripsikan pengertian suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia !
- 1.2 . Menjelaskan fungsi suprastruktur politik .
- 1.3 . Mengidentifikasi komponen komponen infrastruktur politik.
- 1.4 .Tuliskan peranan organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur dalam sistem politik Indonesia.

No.	Organisasi Infrastruktur	Contoh peranannya
1.	Partai politik	.....
2.	Kelompok Kepentingan	.....
3.	Kelompok Penekan	.....
4.	Media Komunikasi Politik	.....

Analisa ( 4C )  
HOTS

### 1.5 Menganalisis perbedaan suprastruktur dan infrastruktur politik Indonesia!

#### Definisi

Infrastruktur politik adalah kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Kelompok-kelompok tersebut dapat berperan menjadi pelaku politik tidak formal untuk turut serta dalam membentuk kebijakan negara. Infrastruktur politik di Indonesia meliputi keseluruhan kebutuhan yang diperlukan dalam bidang politik dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemerintahan negara.

Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Di Indonesia banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik, akan tetapi jika diklasifikasikan terdapat empat kekuatan.

Mari berfikir yang kritis

#### Mari berlatih!

Setelah kalian memahami uraian singkat materi di atas, maka:  
Kerjakan soal di bawah ini!

1. Berikanlah 2 (dua) contoh peranan partai politik !!
2. Berikan penjelasan apa yang dimaksud partai politik, kelompok kepentingan kelompok penekan dan media komunikasi!
3. Bagaimanakah Presiden menjalankan fungsinya!
4. Sebagai komponen infrastruktur politik, partai politik memiliki fungsi komunikasi, jelaskan fungsi komunikasi politik!

C4.  
konseptual

5. Pelaksanaan pemerintahan Indonesia secara kelembagaan melibatkan lembaga lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk menciptakan kondisi politik negara suprastruktur harus memperoleh dukungan infrastruktur yang mantap pula. Coba sekarang kalian analisa apaperbedaan antara supstruktur politik dengan infrastruktur politik Indonesia!

Apabila kalian telah mampu menyelesaikan soal di atas, maka kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 2 berikut.

## Kegiatan Belajar 2

Setelah kalian belajar tentang supra struktur dan infrastruktur politik, coba kalian lengkapi tabel sistem Pemerintahan RI

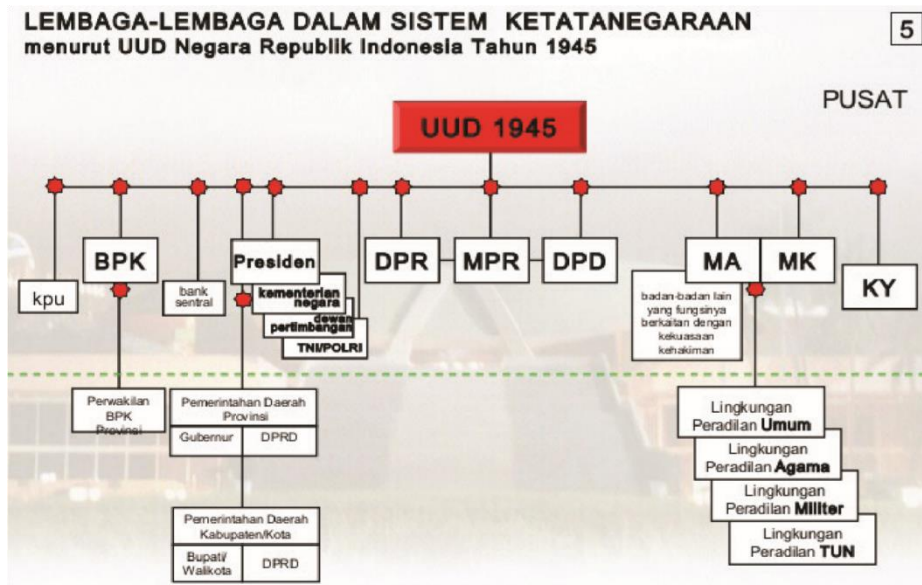
No	SISTEM PEMERINTAHAN REPUBLIK INDONESIA	
1	Landasan Hukum lembaga negara di Indonesia	..... ..... .....
2	Penjabaran Trias Politika dalam sistem Pemerintahan RI.	1. Legislatif ..... ..... ..... 2. Eksekutif ..... ..... ..... 3. Yudikatif ..... ..... .....



Cara untuk mengisi tabel di atas kalian bisa mencari :

Di internet dan buku paket PPKn klas X Hal dan buku lain lain yang relevan. Kalau anda sudah dapat melengkapi tabel tentang sistem pemerintahan RI, Mari kita berlatih dengan mencari tugas wewenang dan fungsi masing lembaga ketatanegaraan RI!

#### LEMBAGA LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI.



*Mari kita berlatih!!*

Setelah memahami tugas, wewenang dan fungsi dari masing lembaga negara coba kalian kerjakan soal di bawah ini!.

1. Pernahkan anda berfikir bagaimana cara menyampaikan aspirasi kepada para anggota DPR RI yang ada di senayan?
2. Jelaskan hubungan antara Mahkamah Agung, DPR, dan Presiden terlihat dalam hakim Agung!
3. Jelaskan perbedaan antara Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung ditinjau dari segi tugas dan wewenangnya!

C4.  
Critical  
thinking.

C2 kontekstual

C2

Konseptual.

Apabila kalian sudah mampu menyelesaikan soal ini, maka kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 3 berikut.

### Kegiatan Belajar 3

Ayo...sekarang kita pahami lebih jauh tentang tata kelola Pemerintahan yang baik.

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan satu konsep yang akhir akhir ini banyak dibahas dalam ilmu politik dan administrasi public, terutama dalam hubungannya dengan demokrasi, masyarakat sipil, partisipasi rakyat dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan.

1. Carilah di internet atau buku buku yang lain tentang ciri- ciri tatakelola pemerintahan yang baik !

#### CIRI-CIRI TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

NO	CIRI-CIRI TATA KELOLA	PENGERTIANNYA
1	Demokratis	Menjalankan tata pemerintahan secara terbuka terhadap kritik dan kontrol dari rakyat
2	Komunikatif	
3	Penguatan diri Sendiri	
4	Keseimbangan Kekuatan	
5	Independensi	

C1 Literasi,  
konseptual

2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang baik/ good governance dan persyaratan tata kelola pemerintahan yang baik!
3. Tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus berpedoman pada prinsip-prinsip good governance, coba kalian jelaskan tentang prinsip -prinsip tersebut!



---

Apabila kalian sudah mampu menyelesaikan soal ini, maka kalian bisa melanjutkan pada kegiatan belajar 4 berikut.

#### KEGIATAN BELAJAR 4



Carilah materi yang terkait dengan Partisipasi masyarakat dalam sistem politik Indonesia sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam buku paket PPKn ( BTP)

#### CONTOH PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM SISTEM POLITIK

NO	LINGKUNGAN	CONTOH PARTISIPASI	MANFAATNYA
1	Sekolah		
2	Keluarga		
3	Masyarakat		

Setelah memahami partisipasi masyarakat dalam sistem politik coba anda kerjakan soal di bawah ini!.

1. Mengapa partisipasi warga negara sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan sistem politik Indonesia!
2. Apa bentuk partisipasi politik yang paling umum dalam masyarakat!
3. Buatlah contoh 3 bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem politik di bidang pertahanan dan keamanan!
4. Berikanlah contoh partisipasi politik warga negara dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkup bangsa dan Negara

---

Dari materi soal di atas, apakah ada hal yang belum kalian pahami? Jika kalian sudah paham kerjakanlah soal pada bagian **mari berlatih** berikut.



#### 4. Evaluasi

##### A. Pilihan ganda

1. Kelompok yang merupakan mesin politik negara sebagai penggerak politik formal yaitu...
  - A. MPR, BPK, ORMAS
  - B. Organisasi mahasiswa. BPK, PARPOL.
  - C. PARPOL, Presiden, DPR.
  - D. DPR, MPR, BPK.
  - E. Organisasi mahasiswa, LSM, PARPOL.
2. Antara suprastruktur politik dan infrastruktur politik terdapat suatu hubungan yang saling mempengaruhi sehingga dapat menciptakan.....
  - A. Suasana kehidupan politik yang serasi.
  - B. Kegiatan politik praktis dalam masyarakat.
  - C. Sikap aktif masyarakat dalam pemerintah.
  - D. Hubungan timbal balik antara pemerintah dan partai politik.
  - E. Berbagai kebijakan politik yang memihak kepada rakyat.
3. Perhatikan data berikut!
  - (1). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar,
  - (2). Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara,
  - (3). Memilih Presiden dan Wakil Presiden,
  - (4). Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD,
  - (5). Melantik Presiden dan Wakil Presiden,
  - (6). Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, sertaBerdasarkan data di atas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD 1945 ditandai oleh nomor ...
  - A. Nomor 1, 2, dan 3
  - B. Nomor 3, 4, dan 5
  - C. Nomor 2, 4, dan 6
  - D. Nomor 3, 4, dan 6
  - E. Nomor 4, 5, dan 6

- 
4. Perhatikan data di bawah ini !
- 1) Lembaga Swadaya Masyarakat
  - 2) Dewan Perwakilan Rakyat
  - 3) Dewan Perwakilan Daerah
  - 4) Komisi Pemberantasan Korupsi
  - 5) Presiden dan Wakil Presiden
  - 6) Mahkamah Konstitusi

Dari data tersebut di atas yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia adalah...

- A. 1 , 2, 3 dan 4
  - B. 1 , 3, 4 dan 5
  - C. 1 , 3, 5 dan 6
  - D. 2 , 3, 5 dan 6
  - E. 3 , 4, 5 dan 6
5. Rencana kenaikan harga BBM menjadi berita utama diseluruh stasiun televisi Indonesia. Sebelum kenaikan harga benar benar dilakukan , seluruh masyarakat Indonesia membicarakan berita tersebut. Kekecewaan di kalangan masyarakat terlihat jelas ketika kenaikan harga BBM benar benar terjadi. Oleh karena itu, disejumlah daerah daerah terjadi aksi unjuk rasa untuk membatalkan kenaikan BBM pada waktu itu. Aksi unjuk rasa penolakan harga BBM juga dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) Cabang Makasar. Mereka menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan.
- Mahasiswa pada aksi unjuk rasa tersebut berkedudukan sebagai...
- A. Aparatur negara.
  - B. Lembaga negara.
  - C. Suprastruktur politik.
  - D. Kelompok penekan.
  - E. Kelompok kepentingan.
6. Kelompok penekan tidak dapat mempengaruhi kebijakan public secara langsung, tetapi pada kenyataanya kelompok ini memiliki kedudukan penting bagi keberlangsungan suatu pemerintahan. Kelompok ini termasuk dalam komponen...
- A. Suprastruktur politik.
  - B. Infrastruktur politik.
  - C. Sosialisasi politik
  - D. Struktur politik.
  - E. Sistem politik.
7. *Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan.* Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang

---

dilakukan untuk mencapai tujuan negara, hal tersebut sesuai dengan UU Nomor 17 tahun 2003, ....

- A. Pasal 1 ayat 6
  - B. Pasal 2 ayat 6
  - C. Pasal 5 ayat 1
  - D. Pasal 6 ayat 1
  - E. Pasal 6 ayat 2
8. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan/atau wakil presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah...
- A. Mahkamah Agung
  - B. Mahkamah Konstitusi
  - C. Dewan Perwakilan Rakyat
  - D. Dewan Perwakilan Daerah
  - E. Badan Pengawas Keuangan
9. Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai fungsi seperti ditunjukkan oleh pilihan...
- A. Legislasi, anggaran, penguatan.
  - B. Legislasi, anggaran, pengawasan.
  - C. Legislasi, pengujian, pengawasan.
  - D. Anggaran, pengujian, pengawasan.
  - E. Pertimbangan, pengujian, pengawasan.
10. Perhatikan cerita berikut!
- Ketika lembaga X menyatakan bahwa pihaknya akan memulai pelaksanaan sidang perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah atau pilkada serentak pada tanggal 15 februari 2017. Ketua lembaga X akan melakukan gelar perkara secara internal terlebih dahulu untuk mempelajari perkara yang diajukan.
- Alur pada cerita tersebut menunjukkan bahwa lembaga X adalah...
- A. Mahkamah Agung.
  - B. Mahkamah Konstitusi.
  - C. Dewan Perwakilan Rakyat.
  - D. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
  - E. Dewan Perwakilan Daerah.
11. Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis.
- Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula, setelah reformasi lembaga yang tidak ada dalam struktur kelembagaan negara adalah...
- A. Mahkamah Agung
  - B. Dewan Perwakilan Rakyat
  - C. Dewan Perwakilan Daerah
  - D. Dewan Pertimbangan Agung

---

E. Badan Pengawas Keuangan

12. Pada saat ini terdapat berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat.

Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut ... kecuali ....

- A. Disiplin masyarakat rendah
  - B. Kurang tegasnya penegak hukum
  - C. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat
  - D. Banyak liputan media masa tentang kejahatan
  - E. Kurangnya contoh dan keteladan dari para pemimpin
13. Lembaga negara yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim Agung diangkat dan diberhentikan oleh 2 lembaga negara yaitu...
- A. MA dengan persetujuan DPR.
  - B. MK dengan persetujuan MPR.
  - C. DPR dengan persetujuan MPR.
  - D. Presiden dengan persetujuan MPR.
  - E. Presiden dengan persetujuan DPR.
14. Antar lembaga negara memiliki hubungan satu dengan yang lain. Hubungan kekuasaan lembaga eksekutif dengan lembaga yudikatif tampak dalam kegiatan...
- A. Pembahasan RUU tentang organisasi masyarakat.
  - B. Pemberian grasi kepada terpidana kasus narkoba.
  - C. Penempatan duta negara lain di Indonesia
  - D. Pelaksanaan judicial review oleh MA.
  - E. Pelaksanaan perjanjian dengan negara lain.
15. Peran serta masyarakat dalam sistem politik Indonesia dalam dilakukan dalam berbagai aktivitas, sesuai UU Nomor 9 tahun 1998 sebuah produk hukum yang dikeluarkan awal reformasi di Indonesia di dalamnya terdapat bentuk-bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum.

Di bawah ini yang tidak sesuai dengan UU tersebut adalah....

- A. Rapat umum
  - B. Mimbar bebas
  - C. Arak-arakan
  - D. Unjuk rasa
  - E. Pawai
16. Negara demokrasi (negara yang berkedaulatan rakyat) menjamin hak-hak warga negara serta memberikan kebebasan kepada warga untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan bernegara. Namun, berdasar pengalaman seringkali terjadi demonstrasi yang berakhir ricuh,

---

pertentangan pendapat yang tajam, dan bahkan mudah terjadi tawuran karena perbedaan.

Kebebasan mengemukakan pendapat di Indonesia terdapat dalam...

- A. Pancasila
- B. UUD NRI tahun 1945
- C. Pembukaan UUD NRI tahun 1945
- D. Pasal 28 E ayat (3) UUD NRI tahun 1945
- E. Pasal 30 ayat (1) UUD NRI tahun 1945

17. Setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan. Bahkan, pekerja seni atau artis lomba-lomba untuk berpartisipasi dalam memperebutkan kursi di pemerintahan.

Hal tersebut mengindikasikan salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi, yaitu.....

- A. Adanya pemilu berkala
- B. Adanya supermasi hukum
- C. Adanya akuntabilitas politik
- D. Bebas berpendapat, berserikat dan berkumpul
- E. Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

18. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan menerapkan Demokrasi Pancasila. Paham Demokrasi Pancasila sesuai dengan keribadian bangsa yang digai dari tata nilai sosial budaya sendiri. Hal ini telah dipraktikkan secara turun temurun jauh sebelum Indonesia merdeka.

Kenyataan ini dapat kita lihat pada masyarakat desa yang menerapkan.....

- A. Voting
- B. Kerja sama
- C. Sikap individual
- D. Musyawarah mufakat
- E. Gotong royong

19. Pemerintah yang cenderung otoriter dan lebih banyak member komando dan intruksi tidak menjalankan prinsip..... dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik ( goog governance ).

- A. Akuntabilitas.
- B. Visi strategis.
- C. Penegak hokum.
- D. Efektifitas dan efisiensi.
- E. Berorientasi pada konsensus.

- 
20. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik , pemerintah harus menegakkan hukum agar terwujud keadilan.

Upaya yang seharusnya dilakukan pemerintah guna menegakkan keadilan adalah....

- A. Memberi sanksi kepada penegak hukum yang terbukti bersalah.
  - B. Menghukum berat orang yang diduga terlibat kasus korupsi.
  - C. Menambah aparat penegak hukum sebanyak banyaknya.
  - D. Mempertahankan undang undang yang telah ada.
  - E. Mengabulkan setiap tuntutan dari masyarakat.
21. Iqbal mengikuti program SM3T yang diadakan oleh pemerintah. Ia ditempatkan di SMA terpencil daerah nusa tenggara. Ia memiliki tujuan mencerdaskan bangsa Indonesia karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia. Melalui program ini pula ia menjadi orang yang menegakkan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia.

Berdasarkan cerita tersebut, langkah yang dilakukan Iqbal termasuk dalam prinsip good governance yaitu...

- A. Efektivitas dan efisiensi.
  - B. Visi strategis.
  - C. Akuntabilitas.
  - D. Partisipasi.
  - E. Responsif.
22. Yoi merupakan seorang anggota DPR yang diketahui melakukan tindak pidana korupsi pada pembangunan wisma atlet SEA games . Ia divonis hukuman penjara selama 4.5 tahun dan denda 250 000 000 ( 25 juta ) oleh majelis hakim . kemudian Yoi mengajukan kasasi ke MA, namun hakim memutuskan untuk menambah hukuman menjadi 12 tahun penjara dan denda 40 000 000 ( juta ).

Berdasarkan cuplikan berita tersebut, pemerintah telah menjalankan tata pemerintahan yang baik karena menjalankan prinsip...

- A. Equality.
  - B. Rule of law.
  - C. Responsive.
  - D. Accountability.
  - E. Consensus orientation.
23. Masyarakat berbondong bondong menuju tempat pemungutan suara untuk menggunakan hak pilih mereka.

Kegiatan masyarakat ini merupakan bentuk dari...

- A. Kelompok kepentingan.
- B. Kelompok penekan.
- C. Partisipasi politik.
- D. Jaringan politik.
- E. Partai politik.

- 
24. Usaha usaha yang dilaksanakan sekelompok warga negara untuk membicarakan dan memecahkan persoalan persoalan politik negaranya, sekaligus ikut mencari alternative pemecahanya disebut...
- A. Komunikasi individual dengan pejabat politik.
  - B. Artikulasi kelompok kepentingan.
  - C. Kegiatan kampanye.
  - D. Pemberian suara.
  - E. Diskusi politik.
25. Contoh perwujudan partisipasi politik peserta didik dalam bidang sosial budaya adalah...
- A. Berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi.
  - B. Mengadakan komunikasi atau dialog dengan wakil rakyat.
  - C. Menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar hukum.
  - D. Memelihara persatuan dan keatuan bangsa demi tegaknya NKRI.
  - E. Membayar pajak secara teratur demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

#### **B. Uraian**

**Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas!**

1. Sistem politik dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat. Jelaskan pengertian sistem politik menurut pendapat para ahli !
2. Pada dasarnya organisasi-organisasi yang tidak termasuk dalam birokrasi pemerintahan merupakan kekuatan infrastruktur politik. Jelaskan apa yang dimaksud *partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi politik*.
3. Sesungguhnya, kedudukan presiden dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kuat, namun dalam perjalanannya presiden dapat di *impeach* oleh lembaga negara lainnya dan mekanisme tersebut diatur dalam Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Uraikan proses *impeachment* dalam ketatanegaraan RI !
4. Pada praktiknya, tatakelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk pengelolaan negara dan masyarakat yang bersandar pada *stakeholders*. Sebutkan 5 (lima) ciri dan karakteristik tatakelola pemerintahan yang baik !
5. Partisipasi politik dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat yang berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Jelaskan bentuk perilaku dan partisipasi politik yang dapat dilakukan oleh kita sebagai warga negara!

#### **C. Penutup**

**Bagaimana kalian sekarang?**



---

Setelah kalian belajar bertahap dan berlanjut melalui kegiatan belajar 1, 2, dan 3, berikut diberikan Tabel untuk mengukur diri kalian terhadap materi yang sudah kalian pelajari. Jawablah sejujurnya terkait dengan penguasaan materi pada UKB ini di Tabel berikut.

#### 5. Rubrik Evaluasi Diri

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1.	Apakah anda telah memahami suprastruktur dan infrastruktur dalam sistem politik Indonesia.		
2.	Dapatkah anda mengidentifikasi lembaga-lembaga negara menurut UUD Tahun 1945.		
3.	Dapatkah anda menganalisis impeachment dalam ketatanegaraan RI menurut UUD Tahun 1945.		
4.	Dapatkah anda menganalisis tatakelola pemerintahan yang baik.		
5.	Dapatkah anda menunjukkan contoh partisipasi warga negara dalam sistem politik Negara Indonesia.		

Jika anda menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, maka pelajarilah materi tersebut dalam Buku Teks Pelajaran dengan bimbingan teman sejawat ataupun guru anda. Apabila anda menjawab “YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkanlah dengan meminta penilaian harian kepada guru anda

Setelah menyelesaikan soal di atas dan mengikuti kegiatan belajar 1.03 tentang Kewenangan lembaga lembaga negara menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Silahkan kalian berdiskusi dengan teman sebangku atau teman lain. Kemudian tuliskan penyelesaian soal tentang kewenangan lembaga lembaga negara menurut UUD Tahun 1945 buku kerja masing-masing!.

Ini adalah bagian akhir dari UKB materi kewenangan lembaga lembaga negara menurut UUD Tahun 1945, mintalah tes formatif kepada Guru kalian sebelum belajar ke UKB berikutnya.